



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PROF.DR.IR.SUMBANGAN BAJA M PHIL PHD
2. Jabatan : KUASA PENANGGUNGJAWAB ANGGARAN (KPJA) SEKRETARIS
UNIVERSITAS
3. NHK : 677143

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.003.600.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
3. Tanah Seluas 306 m2 di KAB / KOTA KOTA BAUBAU , HASIL SENDIRI Rp. 183.600.000
4. Tanah Seluas 845 m2 di KAB / KOTA BUTON, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 160.000 m2 di KAB / KOTA BUTON, HASIL SENDIRI Rp. 640.000.000
6. Tanah Seluas 40.000 m2 di KAB / KOTA BUTON, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
7. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **450.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, YARIS MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 750.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.719.103.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 6.922.703.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.922.703.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.